

RUAS JALAN JJLS GUNUNGKIDUL

## Kekurangan Lampu Penerangan Jalan Umum

**WONOSARI (KR)** - Ruas jalan nasional di Gunungkidul khususnya di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) masih kekurangan fasilitas lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Bayu Susilo Aji mengatakan bahwa ruas JJLS di Kabupaten Gunungkidul sepanjang 80 kilometer dan idealnya membutuhkan sekitar 4.000 titik LPJU. Tetapi hingga kini belum terfasilitasi seluruhnya dan terkait dengan hal tersebut pihaknya telah mengajukan tetapi hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah pusat terkait alokasi anggaran untuk LPJU tersebut.

"Untuk saat ini, kebutuhan penerangan di JJLS hanya mengandalkan LPJU tenaga surya dan jumlahnya baru mencapai 1.300 unit dari hibah dari Kementerian ESDM,"katanya.

Untuk LPJU tenaga surya tersebut memang belum sepenuhnya dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan di malam hari, Kebijakan inovasi ini memang ramah lingkungan tetapi keandalan sistem tenaga surya masih menjadi tantangan.

Selain itu untuk pembangunan infrastruktur JJLS juga memerlukan biaya tambahan terutama untuk pemasangan rambu-rambu dan fasilitas pendukung lainnya. Namun, karena status kewenangan jalan ini belum ditetapkan menjadikan pemasangan LPJU juga menjadi kendala yang signifikan terutama dalam menyediakan infrastruktur yang aman dan nyaman bagi masyarakat. "Semua masih berproses dan harapannya ketersediaan

berbagai sarana pendukung dapat terpenuhi," imbuhnya.

Sampai saat ini jumlah LPJU yang dikelola pemerintah kabupaten dan kabupaten mencapai 22.000 titik termasuk pemasangan yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan khusus untuk LPJU jalan provinsi, yang menjadi aset Dishub DIY, terdapat sekitar 2.000 unit.

Sementara itu, LPJU yang merupakan aset resmi Pemkab Gunungkidul



KR-Bambang Purwanto

Ruas Jalan di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Gunungkidul.

mencapai 3.000 unit. Karena itu pihaknya akan terus berkoordinasi de-

ngan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi agar kebutuhan penerangan

jalan di Gunungkidul dapat terpenuhi. "Kami berharap berkaitan dengan

LPJU dapat segera teratasi,"katanya.

(Bmp)-f

## AKHIR MASA JABATAN BUPATI GUNUNGKIDUL Inspektorat DIY Evaluasi Penyelenggaraan Pemda



KR-Dedy EW

**H Sunaryanta menerima berita acara pemeriksaan inspektorat**

**WONOSARI (KR)** - Dalam rangka pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Gunungkidul Periode 2021-2026, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar *entry meeting* di ruang rapat Handayani Pemkab, Selasa (11/2).

Pelaksanaan pemeriksaan ini mengevaluasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah selama kepemimpinan yang berjalan. Termasuk didalamnya keuangan, kepegawaian, aset sarana dan prasa-

rana, serta sistem penganggaran.

"Pemeriksaan ini mencakup berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belanja modal, serta regulasi yang meliputi peraturan daerah dan peraturan bupati," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul Sri Suhartanta mengatakan.

Kegiatan dihadiri Bupati Gunungkidul H Sunaryanta, Inspektorat DIY Muhammad Setiadi dan un-

dangan. Inspektur DIY, Muhammad Setiadi, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai terhadap capaian data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

"Pemeriksaan juga akan menilai pelaksanaan RPJMD dan RPD serta memberikan rekomendasi yang diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintahan ke depan," katanya.

Sementara itu, Bupati Gunungkidul Sunaryanta menyampaikan bahwa RPJMD disusun untuk jangka waktu lima tahun, namun dalam periode 2021-2025 ini baru dapat diimplementasikan selama empat tahun. Oleh karena itu, masih terdapat beberapa target yang belum sepenuhnya tercapai.

"Setidaknya dalam enam aspek utama pembangunan daerah," ujarnya. (Ded)-f

## AKIBAT KETERBATASAN PERANGKAT

## Capaian Identitas Kependudukan Digital Belum Optimal

**WONOSARI (KR)** - Aktivitas Identitas Kartu Digital (IKD) sebanyak 8.880 orang di Kabupaten Gunungkidul belum optimal dan ini masih jauh dari target nasional sebanyak 30 persen pemilik KTP-el mempunyai kartu identitas yang bisa tersimpan di gawai.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), Disdukcapil Gunungkidul, Anton Wibowo mengatakan, program IKD saat ini sudah disosialisasi Pemerintah Pusat sejak 2022 lalu agar setiap daerah berperan aktif menyukseskan program ini. "Namun program ini belum bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan," katanya.

Terdapat target di setiap daerah untuk melakukan aktivisasi IKD se-

banyak 30 persen dari total jumlah pemilik KTP-el tetapi hingga sekarang program di Gunungkidul belum optimal. Untuk proses aktivisasi yang dilakukan belum banyak karena hingga sekarang baru tercatat sebanyak 8.880.

sedangkan yang sudah melakukan perekaman KTP-el mencapai 99,01 persen. Sebagai tahap awal fokusnya untuk aktivisasi di kalangan ASN di lingkup Pemkab, selanjutnya juga menasar ke masyarakat umum. Tetapi program ini masih menghadapi kendala dan perlu untuk terus digalakkan. "Terdapat sejumlah kendala dalam implementasi IKD diantaranya keterbatasan dukungan perangkat, jaringan internet, dan belum banyak lembaga yang menerima penggunaan IKD se-

bagai pengganti KTP fisik," imbuhnya

Terpisah Kepala Disdukcapil Gunungkidul, Markus Tri Munarja, mengatakan, penerapan IKD diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan dokumen kependudukan. Pasalnya, program ini juga sebagai upaya untuk tertib administrasi kependudukan. Kepemilikan identitas digital memiliki banyak manfaat. salah satunya untuk mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan kartu penduduk secara fisik. IKD juga menjadi solusi dengan layanan digital. Untuk meningkatkan aktivisasi, pihaknya terus melakukan sosialisasi.

"Selain itu, juga ada upaya jemput bola demi mengoptimalkan capaian program IKD tersebut," terangnya.

(Bmp)-f

## OPERASI KESELAMATAN PROGO 2025

## Penegakan Hukum Pelanggar Lalin Kasatmata

**WONOSARI (KR)** - Operasi Keselamatan Progo 2025 kembali digelar Polres Gunungkidul dan akan berlangsung selama 14 hari mulai Senin (10/2) - Minggu (23/2) mendatang. Operasi yang dilaksanakan ini mengedepankan kegiatan preemtif, preventif, serta penegakkan hukum di bidang lalu lintas, dengan pelaksanaan secara elektronik dan teguran.

Sasaran operasi untuk pengendara yang melanggar ketentuan berkendara yakni tidak menggunakan helm, melawan arus, penge-mudi di bawah umur, berbonceng lebih dari 1 orang, serta knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. "Secara spesifik pelanggaran kasatmata termasuk tidak mengenakan helm menjadi perhatian khusus," kata Kapolres Gunungkidul AKBP Ary Murtini SIK

Selasa (11/2).

Selain itu Polisi juga akan menindak pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, berkendara dalam pengaruh alkohol, tidak mengenakan sabuk keselamatan, penggunaan sirine atau strobo yang tidak sesuai peruntukan, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Dalam penindakan terutama pelanggaran lalu-lintas secara kasatmata misalnya tidak mengenakan helm akan menjadi perhatian khusus.

Berdasarkan data hasil penegakan hukum lalu lintas Ditlantas Polda DIY selama tahun 2024, jumlah pelanggaran lalu lintas terdapat sebanyak 204.754 pelanggaran, dengan jumlah pelanggaran tilang sebanyak 87.093 dan teguran sebanyak 117.661.



KR-Bambang Purwanto

**Kapolres Gunungkidul AKBP Ary Murtini SIK periksa kelengkapan anggota Satlantas.**

"Untuk jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas sebanyak 7.176 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 438 orang," imbuhnya.

Dari data pelanggaran jumlah korban tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam menentukan langkah-langkah kepolisian guna meningkatkan kesadaran dan kepedulian masya-

rakat terhadap keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lain. Kegiatan ini diawali dengan apel gelar pasukan di halaman Polres Gunungkidul dengan dipimpin langsung Kapolres Gunungkidul, AKBP Ary Murtini SIK diikuti dari personel TNI-Polri, Dishubkominfo dan Satpol PP Gunungkidul.

(Bmp)-f

## 600 GURU BIMTEK MEMBACA NYARING

## 50 Peserta Didik Kompetensinya Rendah

**WONOSARI (KR)** - Sebanyak 600 guru PAUD, TK dan SD mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) membaca nyaring, menyusul diketahuinya rapor kompetensi baca peserta didik 50 persen tidak mencapai batas minimal.

Bimbingan teknis diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Gunungkidul di lantai III kantornya. Peserta dibagi menjadi 6 angkatan, tiap angkatan sebanyak 100 guru. "Bimtek ini dalam rangka memperkuat pondasi kemampuan membaca bagi anak," kata Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kabupaten Gunungkidul Kisworo SPd MPD dalam membuka acara, Selasa (11/2). Sebagai nara sumber bimtek, Komunitas RAJO (Read Aloud Yogyakarta) dipimpin Miss Elsa dan komunitas Yuk Cari dipimpin oleh Dra Swadesih MPd.



KR-Endar Widodo

**Peserta bimtek bersama Kepala Dispusip Gunungkidul**

Lebih lanjut dijelaskan, bimtek dibayai Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang bertujuan untuk meningkatkan pondasi anak dalam kemampuan literasi anak melalui guru TK/PAUD dan Guru SD/MI kelas bawah. Hal ini penting karena dengan membacakan nyaring anak memiliki keterampilan membaca yang merupakan modal dasar untuk memperoleh daya lit-

erasi untuk masa depan.

Membaca nyaring guru membantu siswa menguasai pengucapan kata-kata, tata bahasa, pengayaan kosa kata dan intonasi. Perlu diketahui bahwa hasil rapor Pendidikan Indonesia tahun 2021 dilaporkan bahwa 1 dari 2 peserta didik kompetensi literasinya belum mencapai literasi minimum.

(Ewi)-f

## MULAI PANEN RAYA PADI

## Luas Tanam Seluruhnya 45.921 Hektare



KR-Endar Widodo

**Panen raya padi di kelompok tani (Poktan) Sedyo Rukun, Krambilsawit, Saptosari**

**WONOSARI (KR)** - Memasuki minggu kedua bulan Februari, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kabupaten Gunungkidul melakukan safari panen raya padi. Diawali panen raya di Kelompok Tani (Poktan) Sedyo Rukun, Kalurahan Krambilsawit, Kapane-won Saptosari, Senin (10/2).

Hasil ubinan 4,3 ton sampai 4,8 ton rata-rata 4,6 ton atau 7,36 ton gabah kering giling (GKP) tiap hektarenya. Selesai dari Saptosari panen raya dilanjutkan ke Kelompok Tani (Poktan) Tani Makmur, Molosari, Kalurahan Hargosari. Karena sebagian wilayah selatan tanaman tumpangsari, pa-

nen padi ini juga diikuti panen jagung.

"Musim tanam sekarang ini luas tanaman padi 45.921 hektare yang secara bertahap akan dipanen," kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Gunungkidul Rismiyadi SP MSi didampingi sekretarisnya Ir Raharjo Yuwono MSi.

Areal tanaman jagung yang akan dipanen di bulan ini 45.000 hektare, sedangkan panen raya padi terbagi menjadi dua bulan Februari dan Maret, untuk Februari seluas 10.921 hektare, sisanya jatuh bulan Maret. Sebenarnya mulai bulan Januari meski hanya seluas 323 hektare petani sudah memetik padi, lebih sedikit

dibanding jagung yang sudah dipanen seluas 1.668 hektare. Luas tanaman jagung tumpangsari bercampur dengan tanaman padi, ketela, kacang seluas 46.611 hektare. Sedangkan tanaman padi 45.921 hektare.

Di wilayah selatan sebagian besar menerapkan pola tanam tumpangsari, dalam hal ini petani bisa panen padi dan polowijo. Tanaman padi yang panen bulan Januari dan Februari ditanam lebih awal atau ngawu-awu. Sedangkan yang panen bulan Maret menunggu hujan turun. Oleh sebab itu areal panen tanaman padi terbanyak di wilayah kawasan selatan yang menabur lebih awal.

(Ewi)-f